

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Lombok Utara tidak termasuk Kabupaten yang menghitung Inflasi namun berperan sebagai penyumbang angka IHK, adapun yang menghitung inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya tiga daerah yaitu Kota Mataram, Kab. Sumbawa dan Kota Bima.

1. Bulan April 2026 andil IPH Kabupaten Lombok Utara pada M2 mengalami penurunan IPH dengan IPH sebesar -1,08 pada komoditi Cabai Rawit, Telur Ayam, dan Cabai Merah, untuk mengatasi kenaikan IPH ini, TPID Kabupaten Lombok Utara selalu melakukan monitoring ke Pasar-pasar untuk memastikan kenaikan harga yang terjadi dan memastikan juga ketersediaan komoditi yang mengalami kenaikan pada minggu tersebut.
2. Bulan Mei 2026 andil IPH Kabupaten Lombok Utara pada M3 mengalami kenaikan IPH dengan IPH Sebesar 0,03 pada komoditi Cabai Merah ,Daging Sapi dan Cabai Rawit untuk menjaga agar IPH tidak mengalami penurunan yang signifikan TPID Kabupaten Lombok Utara selalu melakukan monitoring ke Pasar-pasar untuk memastikan apakah ada jenis komoditi yang mengalami kenaikan/penurunan harga dan memastikan juga ketersediaan komoditi.

Bulan Juni 2026 andil IPH Kabupaten Lombok Utara pada M4 mengalami kenaikan IPH sebesar 0.23 pada komoditi Bawang Merah, Bawang Putih, dan Cabai Merah untuk mengatasi kenaikan / penurunan IPH yang signifikan TPID Kabupaten Lombok Utara melaksanakan pemantauan harga kebutuhan pokok di 3 Pasar yaitu pasar Pemenang, Tanjung dan Gangga di Kabupaten Lombok Utara.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan IPH komoditas yang kita pantau yaitu komoditas yang mengalami kenaikan itu salah satunya yaitu cabai rawit dan daging ayam ras, daging sapi yg selalu mengalami kenaikan hal ini juga disebabkan seiring dengan faktor musiman yaitu menjelang HBKN Idul Adha dan Waisak yang memicu tingkat konsumsi yang lebih tinggi sehingga mengalami peningkatan permintaan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian Inflasi daerah di Kabupaten Lombok Utara pada Triwulan II tahun 2026, TPID Kabupaten Lombok Utara terus menjaga kestabilan IPH dengan strategi 4K.

1. Keterjangkauan harga

Untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui TPID mengambil beberapa langkah strategis.

1. Melaksanakan kegiatan monitoring harga sembako dan komoditi strategis secara harian tetap dilakukan dengan lokasi 3 (tiga) pasar yang ada di Kabupaten Lombok Utara yaitu Pasar Pemenang, Tanjung dan Gangga yang dilakukan oleh enumerator dari

- Diskoperindag Kabupaten Lombok Utara yang kemudian kontributor dari Diskoperindag memasukkan data harga ke Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).
2. Melaksanakan monitoring ke pasar tradisional oleh TPID setiap minggunya dan melaksanakan monitoring pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah.
 3. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berupaya untuk menjaga keterjangkauan harga sembako terutama diwaktu menjelang HBKN Idul Adha 1447 H dan Wa pada bulan Mei 2026 dengan dengan pemantauan harga harian.
 4. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melakukan pengawalan terkait harga gabah dan jagung serta pemantauan harga stok pangan.

1. Ketersediaan Pasokan

Sehubungan dengan menjelang hari raya Idul Adha 1447 H dan hari raya Waisak pada Bulan Mei 2026 yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan pokok masyarakat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berupaya untuk tetap menjaga pasokan bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap tersedia berkoordinasi dengan PERUM BULOG Kanwil Nusa Tenggara Barat.

1. Kelancaran Distribusi

2. Secara akses jalan masih aman, apapun jenis kebutuhan kita dalam daerah itu defisit, kelancaran distribusi ini menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga inflasi.
 3. Kelancaran distribusi akses jalan yang memadai untuk selalu dipastikan, distribusi lancar dan harus selalu di pertahankan.
 4. Rencana kedepan akan dibentuk satgas pangan yang akan melaksanakan salah satu kegiatan pos pemantauan kendaraan logistic baik yang keluar dan yang masuk demi menjaga kelancaran arus distribusi.
- #### **5. Komunikasi Efektif**
6. Mengikuti kegiatan *zoom meeting* Rakor Nasional TPID seluruh Kabupaten/Kota dipimpin langsung Kemendagri RI dan dihadiri oleh beberapa narasumber yang dilaksanakan setiap hari Senin
 7. Telah dilaksanakan High Level Meeting Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2026 pada tanggal 21 Mei 2026 Dalam Rangka Penguatan Sinergi Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 1447 H yang dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan SETDA Kabupaten Lombok Utara.
 8. Arahan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pada kesempatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Utara menyampaikan bahwa perangkat daerah perlu mengidentifikasi secara langsung permasalahan kenaikan harga pangan di lapangan serta melakukan pemetaan terhadap kendala yang dihadapi. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan distribusi bahan pangan guna memastikan kelancaran pasokan menjelang Idul Adha. Ditekankan pula pentingnya upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang HBKN. Kabupaten Lombok Utara telah melakukan beberapa Langkah dan upaya terkait penutupan SPBU, salah satunya melakukan mediasi dengan pihak BPH Migas agar pasokan/kuota solar tidak dialihkan ke daerah lain.

Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan dan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan masih belum ada program unggulan tahun ini untuk pengendalian inflasi

seperti operasi pasar maupun gerakan pasar murah karena kendala anggaran sehingga diminta untuk kedua Perangkat Daerah tersebut untuk segera menindaklanjuti ketidakadaan program tersebut dengan menganggarkan di APBD Perubahan atau segera berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk segera mendapat dukungan dari pihak Bank Indonesia.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang HBKN belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran akan tetapi TPID kabupaten Lombok Utara tetap menjaga stabilisasi harga pasokan dan harga pangan pokok strategis terutama pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Hari Raya Idul Adha 1447 H dan Hari Raya Waisak dengan tetap melakukan pemantauan harga dan berkoordinasi dengan instansi terkait sehingga masyarakat dapat membeli dengan harga yang lebih murah.
2. Operasi pasar juga belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran akan tetapi TPID Kabupaten Lombok Utara tetap menjaga ketersediaan stok pangan di Kabupaten Lombok Utara dengan berkoordinasi dengan Perum BULOG dan instansi terkait sehingga masyarakat dapat membeli dengan harga yang terjangkau.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Operasi pasar untuk selalu dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga terjamin ketersediaan stok pangan di Kabupaten Lombok Utara.
2. Koordinasi antar Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau Perangkat Daerah Teknis terkait harus diperkuat sehingga terjalin dengan baik agar tidak adanya kegiatan yang bertabrakan jadwal pelaksanaannya.
3. Pentingnya Satgas pangan di daerah agar terkait pemantauan harga bisa satu suara.
4. Membuat post pemantauan, agar apa yang masuk dan keluar bisa terinventarisir.
5. Sinkronisasi program kerja masing-masing dinas yang terkait pengendalian inflasi baik secara jangka menengah maupun jangka panjang.